

POLITIK KESEHATAN

“ Peran drg.Hj.Hasnah Syam .Mars Dalam Penurunan Prevalensi Stunting Di Kabupaten Barru”



BURHAN

E041201057



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

POLITIK KESEHATAN

**“ Peran drg.Hj.Hasnah Syam .Mars Dalam Penurunan Prevalensi Stunting
Di Kabupaten Barru”**

BURHAN

E041201057



DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGANTAR

POLITIK KESEHATAN

**“ Peran drg.Hj.Hasnah Syam .Mars Dalam Penurunan Prevalensi Stunting
Di Kabupaten Barru”**

BURHAN

E041201057

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Ilmu Politik

Pada

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

POLITIK KESEHATAN
“ Peran drg. Hj.Hasnah Syam, Mars Dalam Penurunan Prevalensi Stunting Di Kabupaten Barru”

BURHAN

E041201057

Skripsi

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Ilmu Politik pada Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan Pada

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Drs. Sakinah Nadir, S.IP.,M.Si

NIP. 1979121820008122002

Pembimbing Pendamping

Ummi Suci Fathiya Bailussy, S.IP.,M.Si

NIP. 19861008 201903 1 009

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Politik

Drs. Sakinah Nadir, S.IP.,M.Si

NIP. 1979121820008122002



HALAMAN PENERIMAAN

Skripsi

POLITIK KESEHATAN**“ Peran drg. Hj.Hasnah Syam, Mars Dalam Penurunan Prevalensi Stunting Di Kabupaten Barru”**

Disusun dan diajukan oleh

BURHAN**E041201057**

Dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui:  **HAS HASANUDDIN****PANITIA UJIAN**

Ketua : Drs. Sakinah Nadir, S.IP.,M.Si (.....)

Sekretaris :Ummi Suci Fathiya Bailussy,S.IP.,M.Si. (.....)

Anggota :Andi Naharuddin,S.IP,M.Si. (.....)

Anggota :Dian Ekawaty.,S.IP.,MA (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul POLITIK KESEHATAN "Peran drg. Hj.Hasnah Syam, Mars Dalam Penurunan Prevalensi Stunting Di Kabupaten Barru" Adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing utama Drs. Sakinah Nadir, S.IP.,M.Si, dan pembimbing pendamping Ummi Suci Fathiya Bailussy,S.IP.,M.Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maa saya bersedia menerima sanksi atas perbuatann tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juli 2024



(BURHAN)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-nya penulis hingga saat ini diberikan kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Politik Kesehatan “Peran drg. Hj.Hasnah Syam, Mars Dalam Penurunan Prevalensi Stunting Di Kabupaten Barru”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat Untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian yang saya lakukan dapat terlaksana dengan sukses dan dapat terselesaikan atas bimbingan, diskusi, dan arahan dari ibu Ibu Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., selaku pembimbing utama dan Ibu Ummi Suci Fathia Bailusy S.Ip., M.Si. selaku pembimbing II, Saya mengucapkan banya terima juga kepada bapak Bapak Haryanto, S.IP.,M.Si. atas saran dan masukan sebagai bentuk penyempurnaan riset penelitian, Penghargaan setinggi tingginya saya berikan kepada pemerintah kabupaten Barru, Bapak Bupati Barru Ir. Suardi Saleh., M.Si, Dinas PMDPPKBPPPA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Baznas Barru, BAPPELITBANGDA Barru,Dinas Pertanian dan Pemerintah Desa lampoko telah menerima penulis untuk melakukan wawancara dinstansinya dan memberikan informasi terkait penelitian ini.

Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah meluncurkan program KIP-Kuliah, saya mengucapkan terima kasih atas beasiswa yang diberikan kepada saya selama menempuh program Sarjana. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan Universitas Hasanuddin, Civitas Akademik Fisip Unhas, dan kepada Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik: Bapak **Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.**, Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.**, Ibu **Dr. Gustina A. Kambo, S.Ip., M.Si.**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, M.A.**, Ibu **Dr. Ariana, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.**, Bapak **Haryanto, S.IP., M.Si.**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.**, Bapak **Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.**, Bapak **A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si.**, Bapak **Zulhajar, S.IP., M.A.**, dan Ibu **Dian Ekawaty, S.IP., M.A.**, beserta staff Departemen Ilmu Politik, Bapak **Syamsuddin, S.T.**, dan Ibu **Musriati, S.E.**, yang telah memfasilitasi saya menempuh program sarjana. Ucapan khusus saya haturkan kepada dosen tercinta Ibu **Ummi Suci Fathia Bailusy S.Ip., M.Si.** selaku penasehat Akademik, penulis berterima kasih atas segala bimbingan, arahan serta support nyata yang penulis rasakan selama duduk dibangku perkuliahan mulai pada semester awal hingga semester akhir ini.

Terima kasih ta terhingga juga kepada teman teman dinamis 2020 dan ilmu politik 2020 yang telah menemani penulis selama dikampus senang bisa bertemu dan bercengkrama dengan kalian,semoga selalu solid sampai kapanpun, Kepada

sahabatku dari SMA samapi sekarang sahrul,wanca,Fajrin,Sawir, Mawaddah, Fitri Alwi, Muslim dan juga bunda Hj Syaheria Rahim dan Om Arman yang telah menjadi keluarga kedua saya yang selalu mensupport penulis selama ini. dan Untuk Kak Muh dedy Sasmita S.H yang telah memberikan banyak hal material maupun non material dari awal kuliah sampai sekarang kepada penulis.

Dan kepada organisasi tempat saya tumbuh Keluarga besar, Himapol fisip unhas Forum Anak, Forum Genre,Duta Wisata , Duta Budaya kabupaten Barru, desa cemara laliko, teman teman MSIB 7 PT Indekstat konsultan Indonesia sebagai tempat berkembang dan banyak memberikan relasi kepada penulis yang menjadi bekal dan inspirasi penulis untuk menyelesaikan hal ini .Dan kepada anak Unsika Adinda Oktafiani yang selalu memberikan semangat ke penulis dalam penyusunan skripsi .

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan terdalam untuk diri penulis sendiri yang mampu menyelesaikan penulis skripsi ini dengan istirahat yang cukup dan pola makan teratur serta kondisi jiwa yang baik, terima kasih diri telah bertahan sejauh kemampuan saya dan hal ini tidak terlepas dari doa doa orang tua dan keluarga penulis yang dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga proses kepenulisan ini dapat dilalui dengan baik alhamdulillah

Akhir kata, demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi sumbangsi yang berarti bagi pihak yang membutuhkan terutama bagi pembaca itu sendiri. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan (Amin Ya Rabbal Alamin)

Wassalamu'alaiakum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 11 Februari 2024

BURHAN

ABSTRAK

BURHAN. NIM E041201057: POLITIK KESEHATAN “ Peran drg.Hj.Hasnah Syam .Mars Dalam Penurunan Prevalensi Stunting Di Kabupaten Barru”. Di bawah bimbingan Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si dan Ummi Suci Fathiya Bailussy.

Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi ancaman sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, maka perlu adanya peran dari seluruh elemen baik itu masyarakat dan pemerintah termasuk elit politik salah satunya adalah drg.Hj.Hasnah Syam .Mars yang berperan aktif dalam penurunan stunting di Kabupaten Barru.

Penelitian ini mengkaji peran penting drg. Hj. Hasnah Syam, MARS dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Barru. Sebagai Ketua Penggerak PKK Kabupaten Barru, Anggota DPR RI dapil II, Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, dan Ketua Pokja Paud Kabupaten Barru, Hasnah Syam memainkan peran kunci melalui berbagai intervensi spesifik dan sensitif. Dalam hal regulasi dan advokasi, Hasnah Syam terlibat aktif dalam rembuk stunting dan berhasil mengeluarkan beberapa peraturan penting, seperti Peraturan Bupati tentang ASI Eksklusif dan Peraturan Bupati 41 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Penurunan Stunting Terintegrasi.

Distribusi alokasi sumber daya kesehatan merupakan salah satu fokus penting dalam pembangunan dalam bidang kesehatan dengan programnya sehingga mampu menjadikan barru lokus stunting dan menerima bantuan dari pihak eksekutif yaitu Kementerian kesehatan untuk pengembangan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan di Barru. Dalam hal penyerapan sumber daya masyarakat, ia memberdayakan kader posyandu, mengadakan pelatihan, dan bekerja sama dengan USAID ERAT untuk fasilitasi berbagai kegiatan terkait stunting.

Selain itu, Hasnah Syam mempromosikan penanganan stunting melalui berbagai program promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Misalnya, membentuk Duta Parenting untuk mencegah anemia, mensosialisasikan bahaya pernikahan dini dan narkoba, serta berkolaborasi dengan dinas pertanian dalam inovasi satu hari satu telur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi dan upaya intervensi dari drg. Hj. Hasnah Syam, MARS memiliki dampak signifikan dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Barru.

Kata Kunci : Peran, Elit Politik, Stunting

ABSTRACT

BURHAN. NIM E041201057: HEALTH POLITICS "The Role of Drg. Hj. Hasnah Syam. Mars in Reducing the Prevalence of Stunting in Barru Regency". Under the guidance of Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si and Ummi Suci Fathiya Bailussy.

Stunting is a health problem that is a threat to human resources towards a Golden Indonesia 2045, so there needs to be a role from all elements, both society and government, including political elites, one of which is drg. Hj. Hasnah Syam. Mars who plays an active role in reducing stunting in Barru Regency.

This study examines the important role of drg. Hj. Hasnah Syam, MARS in efforts to reduce stunting in Barru Regency. As the Chairperson of the PKK Movement of Barru Regency, Member of the Indonesian House of Representatives for electoral district II, Deputy Chairperson of the Stunting Reduction Acceleration Team, and Chairperson of the Barru Regency Early Childhood Education Working Group, Hasnah Syam plays a key role through various specific and sensitive interventions. In terms of regulation and advocacy, Hasnah Syam is actively involved in stunting discussions and has succeeded in issuing several important regulations, such as the Regent's Regulation on Exclusive Breastfeeding and Regent's Regulation 41 of 2022 concerning the Role of Villages in Integrated Stunting Reduction. The results of this research are that Drg. Hj. Hasnah Syam. Mars plays an active role, namely being a technical team for stunting reduction by creating one day one egg innovations and becoming one of the supports for stunting reduction and becoming an integrated program with key stakeholders both at the regional and central level.

Distribution of health resource allocation is one of the important focuses in development in the health sector with its program so that it can make Barru a stunting locus and receive assistance from the executive, namely the Ministry of Health for the development of health facilities and the welfare of health workers in Barru. In terms of absorbing community resources, it empowers posyandu cadres, conducts training, and collaborates with USAID ERAT to facilitate various activities related to stunting.

In addition, Hasnah Syam promotes stunting management through various promotive, curative, and rehabilitative programs. For example, forming Parenting Ambassadors to prevent anemia, socializing the dangers of early marriage and drugs, and collaborating with the agricultural office in the one-egg-a-day innovation. The results of this study indicate that the contribution and intervention efforts of drg. Hj. Hasnah Syam, MARS have a significant impact on reducing stunting rates in Barru Regency.

Keywords: Role, Political Elite, Stunting

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Teori Elit.....	7

2.2	Politik Kesehatan	10
2.3	PenelitianTerdahulu	12
2.4	Kerangka Pemikiran.....	16
2.5	Skema Berpikir	19
BAB III	19
METODE PENELITIAN	19
3.1.	Jenis Penelitian	20
3.2.	Lokasi dan Objek Penelitian	20
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	21
3.4.	Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.5.	Informan Penelitian	23
3.6.	Teknik Analisis Data	23
BAB IV	GAMBARAN UMUM PENELITIAN	25
5.1	Profil Kabupaten Barru	25
6.1	Profil drg. Hj. Hasnah Syam,Mars	27
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
5.1.	Peran drg. Hj. Hasnah Syam,Mars dalam mengawal dinamika isu kesehatan stunting yang ada dikabupaten Barru dalam mewakili kepentingan umum.....	29
	5.1.1. Regulasi dan Advokasi kesehatan.....	29
	5.1.2. Distribusi Dan Alokasi Sumber Daya Kesehatan	36

5.1.3. Ekstraktif atau penyerapan sumberdaya dari masyarakat.....	41
5.2. Pola Yang Dibangun drg.Hj.Hasnah Syam.,Mars Dalam Mengawal Isu Kesehatan Menekan Prevalensi Stunting	46
BAB VI PENUTUP	53
6.1 Kesimpulan.....	53
6.2 Saran	54
DAFTARPUSTAKA	56
LAMPIRAN	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Barru.....	25
<i>Gambar 5. 1 Kegiatan rembuk stunting lintas sektor.....</i>	<i>35</i>
<i>Gambar 5.2 Pelatihan Kader Posyandu dalam penurunan stunting</i>	<i>40</i>
<i>Gambar 5.3 Peluncuran Inovasi Percepatan penurunan stunting Ketua Tim penggerak PKK Kab.Barru</i>	<i>43</i>
<i>Gambar 5.4 Pembentukan Duta Parenting.....</i>	<i>49</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian	15
<i>Tabel 5.1 Dana Bantuan Operasional Kesehatan Stunting Kabupaten Barru Tahun 2022</i>	39
Tabel 5. 2 Dana Penurunan Stunting Kabupaten Barru	41

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan adalah yang penting di suatu negara demokratis yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seperti Indonesia sepatutnya memberikan support penuh terhadap pemenuhan salah satu hak dan kebutuhan dasar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat yaitu hak untuk mendapatkan kelayakan atas kesehatan, dimana kesehatan merupakan hak fundamental yang diatur *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* pasal 25 menjelaskan bahwa "setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya". Kemudian pada pasal 12 *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Right (ICESCR)* menjelaskan bahwa negara mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang sudah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Bab III tentang HAM dan Kebebasan Dasar Manusia dan Amandemen Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan hak atas pelayanan kesehatan, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab negara untuk memperhatikan masalah kesehatan yang menjadi ancaman bagi masyarakat .

Tahun 2045 menjadi momen penting karena kemerdekaan Indonesia tepat berusia 100 tahun. Indonesia diprediksi di tahun tersebut mendapatkan bonus demografi yaitu sebagian besar penduduknya (70%) berada dalam rentang usia produktif (15-64 tahun). Adapun sisanya, yaitu 30% merupakan penduduk tidak produktif yaitu usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Bonus demografi jika dikelola dengan baik akan menjadi potensi yang besar untuk kemajuan bangsa. Sebaliknya, jika bonus demografi dikelola secara tidak memadai maka memicu timbulnya masalah sosial seperti tingginya kemiskinan, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi (Yudiana, 2022). Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting bagi kemajuan suatu bangsa. Kualitas SDM dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya faktor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Faktor kesehatan berkaitan dengan pemenuhan gizi terutama pada saat anak

usia balita (Sari, Maulida & Winda, 2014; Aprianto & Khoirunnisa, 2013).¹

Presiden Joko Widodo jilid dua dalam Kabinet Indonesia Maju lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM. Visi Pemerintah Indonesia yaitu “SDM Unggul, Indonesia Maju”. “SDM Unggul, Indonesian Maju” bermakna, bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh ada yang mengalami ketertinggalan untuk meraih cita-citanya; Terkait dengan sustainable development goals (SDGs), Pemerintah Indonesia telah mengagendakan tujuh agenda pembangunan yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024, yaitu (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2019). Realitanya, pembangunan SDM memiliki linearitas dengan fenomena *stunting*. Di dalam Global Nutrition Report 2016 termaktub, bahwa prevalensi stunting di Indonesia menempati urutan 108 dari 132 negara partisipan. Ironisnya, di kawasan Asia Tenggara, angka prevalensi stunting Indonesia adalah angka tertinggi kedua setelah Kamboja. Indonesia sendiri telah memiliki payung hukum untuk mengatasi masalah stunting. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat meliputi arah, tujuan, dan strategi perbaikan gizi masyarakat. Tujuan perbaikan gizi adalah meningkatkan mutu gizi perorangan dan masyarakat.²

Pada tahun 2024 Presiden Jokowi Dodo menargetkan prevalensi *stunting* harus turun menjadi 14 persen , dimana provinsi yang tinggi persentase *stunting* adalah di Nusa tenggara timur , Sulawesi Barat , Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Penurunan prevelensi stunting tertinggi dibeberapa provinsi seperti Sulawesi Utara, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumater dan banten dan Sulawesi selatan pada tahun 2022 Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (**SSGI**).

Menurut Komisioner KPAI, Jasra Putra, pengabdian para pendamping gizi di Sulsel selama 8 bulan sangat layak diapresiasi karena telah berhasil

¹Ernawati, A. (2022). Media Promosi Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 18(2), 139-152.

²Putri, S. Y. (2021). Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting Di Indonesia. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 5(2), 163-174.

menurunkan stunting hingga 9,08%. Bahkan, melebihi target nasional menurun 14% di tahun 2024. Angka stunting di Sulsel pada tahun 2018 mencapai 35,6% (Riskesda 2018), tahun 2019 angka stunting menurun hingga 30,5% (SSGBI 2019). Sementara dari data ePPGBM Elektronik Pencatatan & Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, angka stunting tahun 2020 pada bulan Februari 12,3% dan bulan Agustus 11%. Sementara di tahun 2021 bulan Februari angka stunting menurun hingga 9,6% dan bulan Agustus turun hingga 9,08%..³

Prevalensi *stunting* di Provinsi Sulawesi Selatan turun 0,2, dari 27,4% pada Tahun 2021 dan mencapai 27,7% di tahun 2022. Terdapat 14 Kabupaten dengan prevalensi *stunting* di atas rata-rata angka provinsi pada 2022, sisanya 10 Kabupaten/Kota dibawah angka rata-rata provinsi, Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah dengan prevalensi *stunting* tertinggi Tahun 2022, yakni 39,8%. Angka tersebut naik 1,9 dari angka prevalensi *stunting* tahun sebelumnya, yakni 37,9%. Berikutnya Kabupaten Tana Toraja menempati peringkat kedua, sebesar 35,4%, lalu Kabupaten Pangkajene 34,2%, Kabupaten Toraja Utara 34,1%. Disisi lain, Kabupaten Barru memiliki prevalensi *stunting* terendah di Sulawesi Selatan, yaitu 14,1%. Disusul oleh Kota Makassar sebesar 18,4%.⁴Prevalensi balita stunting Kabupaten Barru dari waktu ke waktu Persentase stunting di Kabupaten Barru pada tahun 2017 yaitu 9,1%, 2018 yaitu 28,6 %, dan 2019 yaitu 17,4% (PSG, 2015; Dinkes Kab. Barru, 2020).

Presentase prevalensi dari tahun 2018-2022 dimana pada tahun yang ini tentunya adalah komitmen dari pemerintah daerah dan tentunya pihak terkait yang telah membantu dalam penanganan stunting yang merupakan ancaman bagi sumber daya manusia, tentunya dalam pelaksanaan kebijakan dalam penanganan isu kesehatan termasuk penanganan stunting buah dari kerja keras dan kerja cerdas dari pemerintah daerah, bukan hanya itu kerja sama dalam penanganan kasus stunting ini melibatkan lintas sektor baik itu dilingkup lembaga struktural pemerintah Kabupaten Barru, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, serta media massa, salah satu tokoh masyarakat dan elit politik yang terlibat dalam penurunan prevalensi *stunting* dikabupaten Barru adalah drg Hj Hasna

³[https://humas.sulselprov.go.id/index.php/tag/stunting/#:~:text=Angka%20stunting%20di%20Sulsel%20pada,5%25%20\(SSGBI%202019\).](https://humas.sulselprov.go.id/index.php/tag/stunting/#:~:text=Angka%20stunting%20di%20Sulsel%20pada,5%25%20(SSGBI%202019).)

⁴<https://www.bkkbn.go.id/berita-inovasi-provinsi-sulawesi-selatan-dalam-percepatan-penurunan-stunting>

Syam., Mars.

Pengaruh dalam kekuasaan politik merupakan aspek penting karena memiliki kekuatan untuk mengendalikan. Seseorang yang melakukan kontrol atau pengaruh adalah aktor-aktor politik. Menurut ilmuwan politik baik dalam sistem kelompok yang disebut elite politik. Di Indonesia menurut Herbert Feith pada 1950-an elit politik dapat digolongkan menjadi (1) tipe Pembina Solidaritas yakni penggalang persatuan bangsa, (2) tipe Administrator, yakni sebagai perencana dan pelaksana program pembangunan. Dalam kenyataannya, kelompok elite tidak hanya yang berkuasa (elite pemerintah) tetapi juga dari kelompok pemimpin perusahaan besar.⁵

Tokoh politik drg. Hj. Hasnah Syam,Mars merupakan elit yang mampu mendominasi kontestasi politik pada tahun 2019 dimana merupakan salah satu kader partai nasdem yang berhasil meraih kursi DPR RI di komisi IX dalam hal ini yang menangani tentang ketenagakerjaan dan kesehatan tentunya tugas beliau juga sebagai pemangku kepentingan dalam mengawal isu isu kesehatan yang ada di sulawesi selatan selatan termasuk Kabupaten Barru sehingga, selain menjadi representasikabupaten Barru drg. Hj. Hasnah Syam,Mars tokoh masyarakat di Kabupaten Barru yang peduli tentang isu kesehatan.

Sebagai pemangku kepentingan dalam hal pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesehatan serta elit politik dan juga tokoh masyarakat drg. Hj. Hasnah Syam,Mars dalam penurunan prevalensi *stunting* diKabupaten Barru banyak melakukan inovasi berupa pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan,aktif dalam mempromosikan dan mengedukasi kesehatan ikut serta dalam mem isu kesehatan untuk menekan penurunan prevalensi *stunting* ,dengan melibatkan berbagai elemen yaitu lembaga struktural pemerintah Kabupaten Barru,mitra kerja yaitu Badan kependudukan dan keluarga Berencana (BKKBN),dunia usaha, kelompok masyarakat madani, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan, serta media massa.

Perkembangan politik dewasa ini tentunya membawa perubahan terhadap peran elit politik dalam mengawal masalah politik praktis dan perebutan kekuasaan saja melainkan bagaimanapun elit politik muncul dalam penanganan

⁵ Pasae, Dianto. PERAN ELIT PARTAI PENGUSUNG PRABOWO SANDI PADA PILPRES 2019 DI KOTA MAKASSAR. Diss. Universitas Hasanuddin, 2020.

masalah kesehatan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai: **Politik Kesehatan “Peran drg.Hj. Hasnah Syam, Mars Dalam Penurunan Prevalensi Stunting Di Kabupaten Barru”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimana pola yang dibangun drg. Hj. Hasnah Syam, Mars di masyarakat dalam menekan prevalensi stunting di kabupaten Barru?
- b. Bagaimana drg. Hj. Hasnah Syam, Mars dalam mengawal dinamika isu kesehatan stunting yang ada di kabupaten Barru dalam mewakili kepentingan umum?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk Mengetahui pola yang dibangun drg. Hj. Hasnah Syam, Mars di masyarakat dalam menekan prevalensi stunting di Kabupaten Barru.
- b. Untuk Mengetahui drg. Hj. Hasnah Syam, Mars dalam mengawal dinamika isu kesehatan stunting yang ada di Kabupaten Barru dalam mewakili kepentingan umum.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik
 - a. Menjadi rujukan literatur bagi penelitian yang akan datang mengenai politik kesehatan dan peran elit politik dalam menangani masalah kesehatan.
 - b. Memperkaya kajian ilmu politik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dibidang politik kesehatan dan peran elit dalam masyarakat dalam bidang kesehatan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi khalayak publik dan memperkaya pengetahuan mengenai peran elit dalam politik kesehatan.
 - b. Menjadi rujukan bagi mereka yang tertarik mengkaji tentang bagaimana peran elit politik dalam menangani kasus kesehatan yaitu stunting.

- c. Menjadi acuan pembelajaran bagi para elit politik kedepannya untuk mengawal masalah kesehatan.
- d. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan mengenai elit dan politik kesehatan sebagai landasan teoritis dan alat analisis utama dalam peran drg. Hj. Hasnah Syam, Mars dalam penurunan *stunting* di Kabupaten Barru. Dalam bab ini juga diuraikan kerangka berpikir REpenelitian ini yang tergambarkan dalam skema pikir. Untuk menunjukkan kebaharuan penelitian ini, disajikan pula beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi.

2.1 Teori Elit

Sejarah kehidupan manusia dan peradaban manusia menunjukkan bahwa manusia yang tergolong elit merupakan warisan situasi situasi masa lampau kehidupan manusia. Kehidupan masa lampau ditandai dengan sistem pranata-pranata, kelompok kasta, penguasa, aristokrasi, kelas-kelas sosial besar, dan kelas kelas penguasa. Di berbagai negara kelompok-kelompok ini menempati posisi strategi dalam mengendalikan suatu negara atau sistem politik. Oleh karena itu kebanyakan ilmuwan menganggap kelompok-kelompok tersebut pada masa modern disebut elit penentu.

Elit adalah suatu kristalisasi suatu perkembangan lebih lanjut dan kelas kelas penguasa (Suzannne Keller, 1984:39). Elit elit penentu ini dapat dikatakan sebagai kelas kelas penguasa dan kasta-kasta penguasa.

C. Wright Mills di atas menggambarkan bahwa konsep elite tidak pernah lepas dari politik. Jika politik identik dengan urusan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi maka elite adalah sekelompok kecil orang-orang yang terlibat di dalam urusan-urusan tersebut. Dalam studi ilmu politik, seberapa besar pengaruh elite dapat terlihat dari perdebatan antara teori elite dan pluralisme. Teori elite membantah pandangan pluralisme klasik yang menganggap bahwa kekuasaan didistribusikan dengan setara. Menurut para ilmuwan yang mencetuskan teori elite klasik (Pareto, Mosca, Michels hingga Weber), kekuasaan justru terkonsentrasi di dalam sedikit kelompok atau

individu⁶.

Teori elit mengandung bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering di artikan sebagai sekumpulan orang sebagi individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkarannya kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Mosca dan Pareto membagi stratifikasi dalam tiga kategori yaitu yang memerintah (governing elite), elit yang tidak memerintah (non-governing elite) dan massa umum (non-elite). (Jayadi Nas, 2007).⁷

Sejalan dengan Pareto, Gaetano Mosca, seorang teoritis elit lainnya, mengatakan bahwa tiap masyarakat – entah suatu bangsa baru atau sudah lama merdeka, besar atau kecil – selalu membentuk dua kelas utama: yang memimpin (a class that rules) dan yang dipimpin (a class that is ruled). Mosca (1939), menjelaskan sebagai berikut:

“The first class, always the less numerous, performs all political functions, monopolizes power and enjoys the advantages that power brings, whereas the second, the more numerous class, is directed and controlled by the first.” (Kelas pertama, selalu semakin sedikit, melakukan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati kelebihan yang dimilikinya, sedangkan kelas kedua, semakin banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh yang pertama.) Mosca menjelaskan hubungan dinamis antara elit dan massa.⁸

Dalam pandangannya, para elit berusaha bukan hanya mengangkat dirinya di atas anggota masyarakat lain, tetapi juga mempertahankan statusnya terhadap massa di bawahnya, melalui para

⁶ Redaksi, Pengantar. "Elite dan Kekuasaan." Jurnal Politik 4.1 (2018): 1-4.

⁷ Fadli, Muhammad, et al. "Keterlibatan elit lokal dalam peningkatan partisipasi politik pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015." Aristo 6.2 (2018): 301-328.

⁸ Ibid.

“sub-elit” yang terdiri dari kelompok besar dari “seluruh kelompok menengah yang baru, aparaturn pemerintahan, manager, administrator, ilmuwan lainnya. Setiap masyarakat di manapun berada akan selalu dipimpin oleh sekelompok kecil individu yang berkuasa atas sejumlah besar anggota masyarakat lainnya, yang disebut massa, untuk tunduk dan mematuhi perintahperintahnya. Elit lokal yang dimaksud dalam hal ini adalah elit politik, elit agama, dan elit masyarakat. Peran masing-masing elit di daerah sangat ditentukan oleh habitus dan modal yang mereka miliki. (Mosca. 1939).⁹

Elit partai politik di daerah secara umum terbagi dua macam. Pertama, elit partai politik yang berda di parlemen. Kedua, elit partai politik yang non parlemen alias sebatas menjadi pengurus partai. Dua jenis elit partai politik ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan efektivitas kerja partai politik. Elit partai politik yang bertugas di parlemen harus menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan produk undang-undang yang pro rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dapat dipulihkan kembali apabila peran kadernya diparlemen memukau. Jika kader partai politik di parlemen tidak bermutu maka wibawa partai politik menurun. Sementara elit partai politik non parlemen, yaitu elit partai politik yang tidka duduk di DPR, juga memiliki peran. Peran elit partai politik non parlemen sebenarnya lebih mengarah pada pendidikan politik warga masyarakat. Sebagai elit partai non parlemen, tugas utamanya bukan hanya merekrut dukungan massa, melainkan juga melakukan pendidikan politik dan kaderisasi yang baik. Dengan demikian, partai politik menjadi ruang kaderisasi yang dapat melahirkan intelektual organik. Fungsi ini akan berjalan apabila para elit partai politik non parlemen menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik. Selain itu, tugas para elit partai politik di daerah adalah mempengaruhi warga masyarakat daerah untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Ini merupakan salah satu tugas yang prinsipil, terlebih dalam kaitannya dengan proses demokrasi di daerah. Hal yang paling pokok bagi elit politik adalah melakukan usaha-usaha rasional persuasif untuk mendorong masyarakat supaya lebih aktif dalam partisipasi politik. Masyarakat harus diyakinkan tentang arti penting dan nilai vital politik. Sehingga dengan pemahaman seperti itu, masyarakat turut berpartisipasi dalam aktivitas politik, termasuk warga masyarakat di

⁹ Ibid.

daerah. (Abd. Halim, 2014).¹⁰

2.2 Politik Kesehatan

Sebelum memahami lebih lanjut mengenai konsep politik kesehatan terlebih dahulu memahami arti dari politik itu sendiri, dimana politik diartikan sebagai usaha menggapai kehidupan yang baik, di Indonesia kita teringat pepatah *gemah ripah loh jinawi*. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *en damonia* atau *the good life*.

Dan pengertian lebih lanjut mengenai pengertian politik menurut para ahli yaitu :

- Menurut Peter Merkl : “politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (politics, at its best is anoble quest for a good order and justice)¹¹ sedangkan
- Menurut Andrew Heywood “ Politik adalah kegiatan satu bangsa yang bertujuan untuk membuat ,mempertahankan,dan mengamandemen peraturan peraturan yang mengatur kehidupannya yang berarti tidak lepas dari gejala konflik dan kerja sama.

Dengan demikian kita simpulkan bahwasanya politik memiliki 5 konsep pokok yaitu

- a. Negara
- b. Kekuasaan (power)
- c. Pengambilan keputusan (decision making)
- d. Kebijakan (policy, belied)
- e. Pembagian (distribution dan alokasi (allocation)

Politik kesehatan pertama kali dikenalkan oleh salah satu aktivis kesehatan masyarakat, pembaharu sosial, politikus, dan antropolog yaitu Rudolf Virchow (1821–1902), Virchow adalah advokat vokal untuk kesehatan masyarakat. Tulisan dan ajarannya sarat dengan pengamatan dan anjuran tentang cara-cara meningkatkan kesehatan

¹⁰ Ibid.

¹¹Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.

masyarakat dengan memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial mereka. Dia memasuki politik, melayani di Reichstag Jerman (1880–1893), sambil juga memimpin Institut Patologis di Berlin. Dia membantu membentuk reformasi perawatan kesehatan yang diperkenalkan di Jerman selama pemerintahan Otto von Bismarck. Tulisan-tulisannya yang produktif, terutama pada topik patologi, mencakup banyak esai dan pidato tentang pengobatan sosial dan kesehatan masyarakat.

Kesehatan termasuk aspek kehidupan manusia lainnya merupakan sebuah isu politik dalam banyak hal (Bambra, et al., 2005):

- a. Kesehatan adalah politik karena, sama seperti sumber daya yang lain atau komoditas di bawah sistem ekonomi neoliberalisme, beberapa kelompok sosial mempunyai lebih dari yang lainnya.
- b. Kesehatan adalah politik karena determinan sosialnya (social determinants) adalah mudah diterima dalam intervensi politik dan oleh karena bergantung pada tindakan politik (biasanya).
- c. Kesehatan adalah politik karena hak terhadap standar kehidupan yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan harus menjadi aspek kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Kesehatan adalah politik karena kekuasaan dilaksanakan sepanjang itu sebagai bagian dari sistem ekonomi, sosial dan politik yang lebih luas. Perubahan sistem ini membutuhkan kesadaran dan perjuangan politik.¹²

Berbagai macam kegiatan yang terjadi di sektor kesehatan, menyangkut proses menentukan tujuan kesehatan dan bagaimana cara mencapainya. Tindakan yang beraneka ragam yang dilakukan penguasa maupun masyarakat disektor kesehatan yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan-tujuan kesehatan dan cara mencapainya.

Tiga hal pokok yang harus dipelajari (secara holistik) dalam politik kesehatan, yaitu

- a. Regulasi, kebijakan/peraturan/ UU yang berkaitan dengan kesehatan di pusat maupun di daerah (input-proses-output).
- b. Distribusi dan alokasi sumber daya kesehatan.
- c. Ekstraktif penyerapan sumberdaya dari masyarakat lokal maupun dari internasional untuk mencapai tujuan kesehatan.

¹²Palutturi, Sukri. "Pentingnya Politik Bidang Kesehatan." *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia* 2.03 (2013): 8228.

Politik kesehatan merupakan upaya membangun masyarakat dalam bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan publik yang seyogyanya tidak hanya dijadikan sebagai kendaraan politik para calon atau kandidat kepala daerah. Politik kesehatan atau kebijakan kesehatan memang akhirnya ditentukan oleh keputusan politik. Kalau kehidupan politik disuatu daerah tidak sehat, jangan harap kesehatan masyarakat di daerah itu akan diurus dengan sehat pula. Politik yang sakit akan membiarkan rakyatnya sakit.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Farah Oktafiani dalam skripsi berjudul 'Politik Kesehatan: Studi Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids Dalam Segi Perawatan Dan Dukungan Bagi Orang Dengan Hiv/Aids (Odha) Pada Wanita Pekerja Seks (Wps) Di Kota Surabaya". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terkait implementasi Perda No.4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kota Surabaya dalam segi perawatan dan dukungan dapat tarik kesimpulan bahwa implementasi Perda No.4 Tahun 2013 dalam segi perawatan dan dukungan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan Dinas Kesehatan sebagai leading sector, telah sesuai dengan harapan dan tujuan dari amanat Perda itu sendiri. Implementasi yang berbentuk program Home Base Care, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Care Giver telah dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya melalui Seksi P2M sesuai dengan amanat Perda dan mengikuti kaidah-kaidah konvensional atau kebijakan formal di atasnya. Implementasi yang berupa program ini pun mendapat dukungan penganggaran APBD secara tepat dan efisien, sehingga dapat menjangkau dan dijangkau oleh pemanfaat yang dalam hal ini adalah ODHA WPS. Namun dalam pelaksanaannya, program ini juga tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak seperti, LSM peduli HIV, Komisi Penanggulangan HIV AIDS, Dinkes, maupun masyarakat itu sendiri. Kolaborasi yang terjadi diantara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penanggulangan HIV AIDS di Kota Surabaya dalam segi perawatan dan dukungan menjadi kunci

keberhasilan implementasi yang berupa perawatan dandukungan. Penekanan perawatan dan dukungan menjadi cukup strategis mengingat masih banyaknya bentuk-bentuk pengabaian dan diskriminasi bagi ODHA WPS dalam mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah khususnya pada layanan kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh IBRAHIM ISA dalam skripsi yang berjudul “Peran Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Di Kota Malang” hasil dari penelitian ini Peran Elit Politik PKB di DPRD dalam meningkatkan Mutu Madrasah di kota Malang. Secara umum bahwa peran Elit politik PKB yang saat ini yang duduk di kursi legislatif (DPRD) tidak secara langsung memberikan satu kontribusi secara face to face, apalagi harus membawa kendaraan organisasi, mereka hanya memperjuangkan kalau instansi pendidikan memberikan informasi dan keluhan terkait dengan pengembangan Mutu Madrasah. Para Elit Politik PKB kota Malang akan memperjuangkan dengan semaksimal mungkin. Untuk selanjutnya yang menjadi penentu dalam hal kebijakan tersebut semuanya tergantung pada sidang dewan.

Penelitian yang dilakukan Ni Wayan Gita Sadhana Savitr dan I Nyoman Sukma Arida pada jurnal yang berjudul “Peran Elit Desa Dalam Pengembangan Wellness Tourism Di Desa Adat Bindu, Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung” hasil dari penelitian ini adalah pengembangan wellness tourism di Bindu masih di kelola oleh keluarga dari Gusti Suastawa sehingga yang dimaksud elit desa dalam peneltian ini yakni Gusti Suastawa dan kakak beliau yang menjadi balian yang biasa dipanggil Ajik Healer. Adanya wisata berobat di Bindu dimulai sejak 9 tahun lalu oleh Ajik Healer, beliau merupakan keturunan dari Balian yang ada di Bindu. Balian merupakan sebutan dukun di Bali atau orang yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit.

Dari ketiga penelitian diatas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, penelitian ini memperlihatkan persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian adala ketiga penelitian diatas meneliti mngenai peran elit terhadap isu isu masyarakat termasuk HIV AIDS, Pendidikan , dan juga pariwisata. Perbedaan dari penelitian yang saya lakukan adalah objek penelitian yaitu stunting pada tingkat daerah.

	Penulis	Farah Oktafiani	Ibrahim Isa	Ni Wayan Gita Sadhana Savitr Dan Inyoman Sukma Arida
Judul	"POLITIK KESEHATAN" " Peran drg. Hj.Hasnah Syam .Mars Dalam Penurunan Prevalensi Stunting Di Kabupaten Barru"	'Politik Kesehatan: Studi Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Hiv Dan Aids Dalam Segi Perawatan Dan Dukungan Bagi Orang Dengan Hiv/Aids (Odha) Pada Wanita Pekerja Seks (Wps) Di Kota Surabaya"	Peran Elit Politik Partai Kebangkitan Bangsa (Pkb) Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah Di Kota Malang"	"Peran Elit Desa Dalam Pengembangan Wellness Tourism Di Desa Adat Bindu, Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung"
Teori	Teori elit politik Konsep Politik Kesehatan	Teori Implementasi Kebijakan Konsep Kebijakan Publik	Partai Politik. Peran Elit Konsep Perkembangan	Peran elit desa Wellness Tourism

			pendidikan di madrasah	
Tujuan	<p>Untuk Mengetahui pola yang dibangun drg. Hj. Hasnah Syam, Mars di masyarakat dalam menekan prevalensi stunting di Kabupaten Barru. Serta pengawalan terhadap dinamika isu kesehatan stunting yang ada di Kabupaten Barru dalam mewakili kepentingan umum.</p>	<p>Untuk Mendeskripsikan keberhasilan dari implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dalam Segi Perawatan dan Dukungan pada ODHA WPS di Kota Surabaya. Serta Perawatan dan Dukungan pada ODHA WPS di Kota Surabaya jika dilihat dari analisis Content dan Context Merilee S. Grindle.</p>	<p>Untuk Mengetahui langkah-langkah dan latar belakang serta peranapa saja yang dilakukan oleh elit politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam meningkatkan Mutu Madrasah di Kota Malang.</p>	<p>Untuk Mengetahui peran elit desa dalam pengembangan wellness tourism di Desa Adat Bindu sebagai salah satu daya tarik wisata yang ada di Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.</p>

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

2.4 Kerangka Pemikiran

Stunting merupakan kondisi dimana balita mengalami gagal pertumbuhan yang ditandai dengan tubuh yang pendek dibanding balita seusianya . Akibat dari stunting pada balita dapat berdampak jangka panjang, antara lain menurunkan produktivitas, mengganggu tingkat kecerdasan, dan rentan terhadap penyakit. Ada beberapa penyebab yang dapat menyebabkan balita mengalami stunting. Penyebab stunting secara tidak langsung dapat terjadi karena gizi ibu selama masa kehamilan yang kurang terpenuhi dapat mengganggu proses pertumbuhan janin. Ibu hamil dengan status gizi yang kurang memadai akan menyebabkan janin kurang gizi, BBLR (Berat Badan Bayi Lahir Rendah), dan pertumbuhan balita terganggu. Pendidikan ibu terhadap cara pengasuhan anak juga dapat menyebabkan stunting, ibu dengan pengetahuan yang sudah memadai tentang pengasuhan anak akan dapat meminimalisir terjadinya stunting balita . Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan memenuhi gizi sejak masa kehamilan, memberi ASI (Air Susu Ibu) eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan, selalu memantau perkembangan anak, mendampingi ASI dengan MPASI (Makanan Pendamping ASI), dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Perkembangan anak pada masa balita mengalami tumbuh kembang secara pesat saat berusia 0 – 5 tahun, dimana masa ini sering disebut masa golden age atau masa yang sangat penting bagi balita. Pada usia tersebut anak akan cepat dalam menyerap informasi yang akan membentuk kepribadian dan karakter, sehingga dibutuhkan perhatian lebih dari orang tua dalam memperhatikan kebutuhan gizi anaknya . Sekitar 50% kecerdasan manusia terjadi ketika anak berumur sampai 4 tahun, dan 80% ketika anak mencapai umur 8 tahun dan mencapai titik maksimal pada umur 18 tahun .¹³

Indonesia merupakan Negara yang menduduki peringkat ke-lima dengan prevalensi stunting yaitu sebesar 36% setelah negara India, Nigeria, Pakistan dan Cina . Angka prevalensi stunting di Indonesia belum mencapai angka yang diharapkan oleh WHO yaitu dibawah 20%

¹³Anggraeni, Maulina Rizky, Uky Yudatama, and Maimunah Maimunah. "Clustering Prevalensi Stunting Balita Menggunakan Agglomerative Hierarchical Clustering." JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA 7.1 (2023): 351-359.

. Dari 180 Negara di dunia, permasalahan gizi di Indonesia memiliki peringkat ke 117 dimana masih jauh tertinggal dengan negara tetangga, seperti Malaysia menduduki peringkat 44, Vietnam menduduki peringkat 58, Thailand menduduki peringkat 64, dan Singapura menduduki peringkat 12. Dengan keadaan tersebut pemerintah Indonesia membuat suatu konsentrasi terhadap permasalahan prevalensi balita melalui rapat yang dipimpin oleh ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TP2NK) dengan mengajak Lembaga terkait agar dilakukan langkah penanganan yang tepat agar angka prevalensi stunting di Indonesia menurun. Tahun 2024 pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting balita dapat turun ke angka 14%, Upaya yang dilakukan pemerintah adalah untuk menurunkan angka prevalensi stunting dengan tiga intervensi spesifik sebelum kelahiran.¹⁴

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Selatan turun 0,2, dari 27,4% pada Tahun 2021 dan mencapai 27,7% di tahun 2022. Terdapat 14 Kabupaten dengan prevalensi stunting di atas rata-rata angka provinsi pada 2022, sisanya 10 Kabupaten/Kota dibawah angka rata-rata provinsi. Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi Tahun 2022, yakni 39,8%. Angka tersebut naik 1,9 dari angka prevalensi stunting tahun sebelumnya, yakni 37,9%. Berikutnya Kabupaten Tana Toraja menempati peringkat kedua, sebesar 35,4%, lalu Kabupaten Pangkajene 34,2%, Kabupaten Toraja Utara 34,1%. Disisi lain, Kabupaten Barru memiliki prevalensi stunting terendah di Sulawesi Selatan, yaitu 14,1%. Disusul oleh Kota Makassar sebesar 18,4%.¹⁵

Dalam peran penurunan *prevalensi stunting* jika dilihat dari teori elit yang dipaparkan oleh Mosca, drg. Hj. Hasnah Syam., Mars beliau merupakan elit yang memimpin (a class that rules) merupakan Elit partai politik yang bertugas di parlemen yang harus menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan produk undang-undang yang pro rakyat dalam hal ini memenuhi tugas dan wewenangnya sebagai wakil

¹⁴ Ibid.

¹⁵ <https://www.bkkbn.go.id/berita-inovasi-provinsi-sulawesi-selatan-dalam-percepatan-penurunan-stunting>

rakyat.

Dalam mengawal isu kesehatan tentunya suatu elit memiliki pola yang dibangun dalam masyarakat dimana menurut John Davies, Seorang ilmuwan *University Of Maryland Center for Internasional Development And Conflik Management*, membedakan tiga pendekatan dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada didalam masyarakat yaitu seorang elit melakukan pendekatan berdasarkan kekuasaan (*power-based approach*), pendekatan berdasarkan hukum (*right-based approach*), dan berdasarkan kepentingan (*interest – based aproach*).¹⁶

Tiga hal pokok yang harus dipelajari (secara holistik) dalam politik kesehatan, yaitu

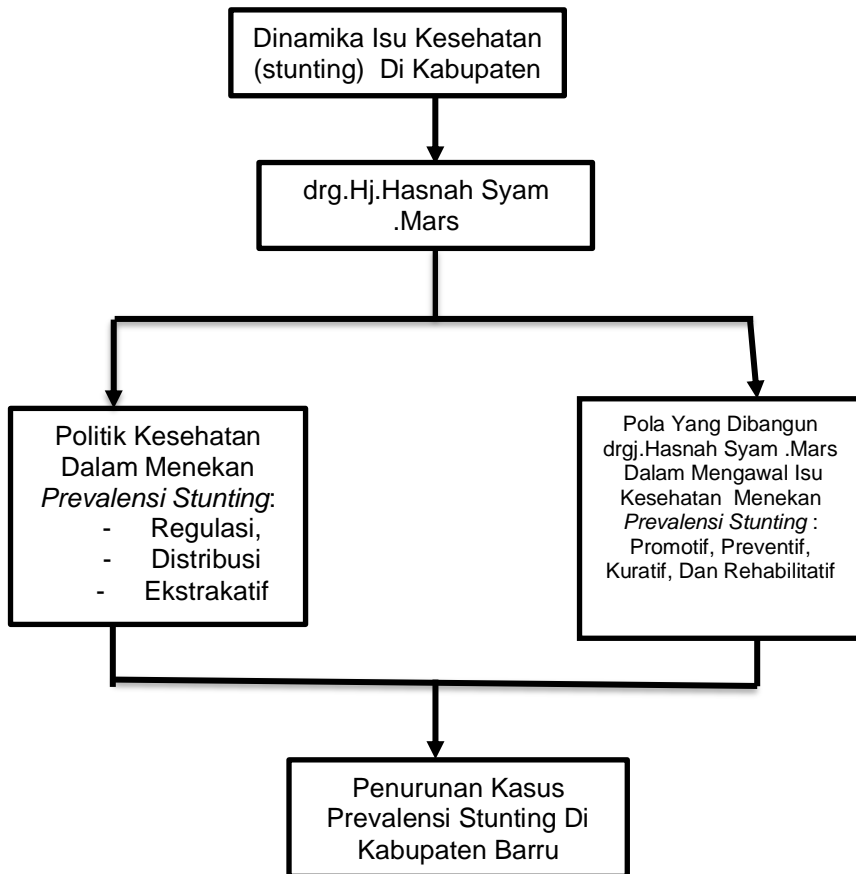
- a. Regulasi, kebijakan/peraturan/ UU yang berkaitan dengan kesehatan di pusat maupun di daerah (input-proses-output).
- b. Distribusi dan alokasi sumber daya kesehatan.
- c. Ekstraktif penyerapan sumberdaya dari masyarakat lokal maupun dari internasional untuk mencapai tujuan kesehatan.

Dari segi upaya penanganan masalah kesehatan terdapat pada metode promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, menyatakan bahwa pelayanan kesehatan meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan, baik pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan tradisional (yankestrad). Dalam rencana strategis WHO tahun 2001, salah satu poin adalah dilaksanakannya integrasi obat tradisional (OT) sehingga OT dapat dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan (*World Health Organization, 2002*), tentunya yang menjadi dinamika dalam menurunkan *prevalensi stunting* yang ada dikabupaten Barru.¹⁷

¹⁶ (A.A Said Gatara, *SOSIOLOGI POLITIK ,Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian, 2007*)

¹⁷Widowati, L., Sampurno, O. D., Siswoyo, H., Sasanti, R., Nurhayati, N., & Delima, D. (2020). Kajian Kebijakan Pemanfaatan Obat Tradisional Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Era Jaminan Kesehatan Nasional. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 246-255.

2.5 Skema Berpikir



BAB III METODE PENELITIAN